



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Faktor-Faktor Utama Yang Membuat Australia  
Memberikan Bantuan Kontra-Terrorisme Kepada  
Indonesia**

Skripsi

Oleh

Maudi Cahyani

2015330008

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Faktor-Faktor Utama Yang Membuat Australia  
Memberikan Bantuan Kontra-Terrorisme Bersama  
Indonesia**

Skripsi

Oleh

Maudi Cahyani

2015330008

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2018



**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Maudi Cahyani  
Nomor Pokok : 2015330008  
Judul : Faktor-Faktor Utama Yang Membuat Australia Memberikan Bantuan Kontra-Terrorisme Kepada Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 14 Desember 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Giandi Kartasmita, S.IP., M.A :

**Sekretaris**

Idil Syawfi, S.IP., M.Si

**Anggota**

Dr. Atom Ginting Munthe

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maudi Cahyani  
NPM : 2015330008  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Faktor-Faktor Utama Yang Membuat Australia Memberikan Bantuan Kontra-Terrorisme Kepada Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Desember 2018



## ABSTRAK

Nama : Maudi Cahyani  
NPM : 2015330008  
Judul : Faktor-Faktor Utama Yang Membuat Australia Memberikan Bantuan  
Kontra-Terrorisme Kepada Indonesia

---

Penelitian ini membahas mengenai alasan Australia dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap Indonesia pada bidang kontra-terorisme, pasca Bom Bali I tahun 2002, walaupun kedua negara seringkali memiliki hubungan tidak harmonis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Berdasarkan konsep kepentingan nasional oleh Paul Seabury dan Robert J. Art yang menyatakan bahwa ada kepentingan vital yang ingin dicapai oleh suatu negara dengan hubungannya bersama negara lain, serta konsep kerja sama internasional oleh Etel Solingen yang menjabarkan bahwa kerja sama internasional dilakukan oleh negara karena adanya kepentingan bersama untuk mengatasi isu atau ancaman yang menjadi perhatian bersama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia memberikan bantuan kontra-terorisme kepada Indonesia karena adanya alasan kepentingan nasional. Tidak hanya itu, adanya faktor musuh bersama, yaitu terorisme, juga menjadi alasan Australia dalam melakukan kerja sama serta memberikan bantuan kontra-terorisme kepada Indonesia.

Kata kunci:

Hubungan Australia-Indonesia, kontra-terorisme, kepentingan nasional, kerja sama internasional, *common enemy*, kebijakan luar negeri

## **ABSTRACT**

*Name : Maudi Cahyani*  
*Student Number : 2015330008*  
*Title :The Main Factors of Australia's Counter-Terrorism Assistance to Indonesia*

---

*This reseach focused on Australia's reasons on giving counter-terrorism assistance to Indonesia in the wake of the first Bali Bombing in 2002 even though the two countries relations is not always in a good term. This research used qualitative method with the case study approach. Based on Paul Seabury's and Robert J. Art's national interest concept that indicates a country attempted to achieve its vital interests with the relations with other countries, and Etel Solingen's concept of international cooperation, which conveys that a country's decision to cooperate was influenced by a common interest to overcome issues or threats, and the outcome of this research shows the counter-terrorism assistance that Australia provides for Indonesia has some national interest reasons. A common enemy factor, in this case is terrorism, also became one of Australia's reason to cooperate and provide counter-terrorism assistance to Indonesia.*

*Keywords:*

*Australia-Indonesia Relations, counter-terrorism, national interest, international cooperation, common enemy, foreign policy*

## **KATA PENGANTAR**

Topik penelitian terkait terorisme telah menjadi salah satu isu yang menarik untuk di bahas saat ini. Keterlibatan aktor-aktor non-negara dan sifat ancamannya yang lintas negara membuat isu ini semakin kompleks. Beberapa rangkaian peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia menjadikan isu tersebut sebagai salah satu fokus Pemerintah Australia dalam bidang keamanan dan pertahanan negaranya. Menjadi lebih menarik untuk dibahas terutama melihat pola hubungan antara Australia dan Indonesia yang seringkali mengalami fluktuasi. Namun, di satu sisi, Australia tetap menjalin kerja sama kontra-terorisme dengan Indonesia, dan juga memberikan beberapa bantuan untuk menangani isu terorisme tersebut.

Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan akademik yang dapat digunakan oleh pembaca untuk memahami faktor atau alasan Australia dalam melakukan kerja sama dan memberikan bantuan kontra-terorisme dengan Indonesia, khususnya pasca Bom Bali I. Penulis juga berharap bahwa ke depannya terdapat tulisan lainnya yang mampu mengeksplorasi topik ini lebih lanjut dari sudut pandang yang berbeda.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dan membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam tulisan ini.

Bandung, 7 Desember 2018

Maudi Cahyani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kuasa, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam proses penelitian ini. Kepada kedua orang tuaku yang selalu mendukung segala keputusan dan selalu memberikan masukan kepada saya, untuk kakakku, yang sudah bersedia mendengarkan segala keluh kesahku, terima kasih.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung ikut terlibat dalam proses penulisan skripsi ini. Kepada Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., beserta jajarannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., beserta jajarannya, serta Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Ibu Sylvia Yazid, Ph.D. Kepada para dosen penguji, Mas Giandi, Bang Atom, dan Mas Idil, terima kasih atas segala masukan-masukan yang diberikan.

Tidak lupa, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Idil Syawfi, yang telah berkontribusi sangat penting dalam penulisan skripsi ini, atas segala bimbingan, bantuan, saran, dan kritik yang disampaikan. Terima kasih untuk orang-orang terdekatku, karena telah membantu mewarnai dunia perkuliahan ini menjadi lebih menarik. Terima kasih atas segala bantuan, atas segala suka dan duka, atas segala kepedulian, dan terima kasih untuk segala hal yang mungkin tak tersampaikan.

Bandung, 7 Desember 2018

Maudi Cahyani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR AKRONIM</b> .....	vii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1    Deskripsi Masalah .....	6
1.2.2    Pembatasan Masalah.....	9
1.2.3    Rumusan Masalah.....	9
1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.3.1    Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2    Kegunaan Penelitian .....	10
1.4    Kajian Literatur .....	11
1.5    Kerangka Pemikiran .....	14
1.6    Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.6.1    Metode Penelitian .....	20
1.6.2    Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7    Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KEBIJAKAN AUSTRALIA TERKAIT KONTRA-TERORISME DAN KERJA SAMA KONTRA-TERORISME BERSAMA INDONESIA</b> ..	<b>24</b>
2.1    Pandangan Australia Terkait Terorisme .....	24
2.2    Kebijakan Australia Terkait Terorisme .....	29
2.3    Kerja Sama Kontra-Terrorisme Australia dan Indonesia .....	37

2.3.1	<i>Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism</i> .....	38
2.3.2	<i>Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime</i> .....	39
2.3.3	<i>Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing</i> .....	40
2.3.4	<i>Joint Declaration of Comprehensive Partnership Between Indonesia and Australia</i> .....	41
2.3.5	Perjanjian Lombok .....	42
2.4	Implementasi Kerja Sama Kontra-Terrorisme Australia – Indonesia.....	44
<b>BAB III ANALISA KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM UPAYA KONTRA-TERORISME BERSAMA INDONESIA</b> .....		49
3.1	Australia dan Pandangannya terhadap Indonesia .....	49
3.2	Kepentingan Australia dalam Kerja Sama Kontra-Terrorisme bersama Indonesia.....	53
3.3	Terorisme sebagai Ancaman Bersama bagi Australia dan Indonesia.....	58
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....		62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		61

## DAFTAR AKRONIM

ADF	: <i>Australian Defence Force</i>
APEC	: <i>Asia-Pacific Economic Cooperation</i>
APG	: <i>Asia/Pacific Group</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nation</i>
ASIO	: <i>Australia Security Intelligence Organization</i>
ASIS	: <i>Australia Secret Intelligence Service</i>
ATA	: <i>Anti Terrorism Act</i>
AUSTRAC	: <i>Australian Transaction Reports and Analysis Centre</i>
DCP	: <i>Defence Cooperation Program</i>
Densus	: Detasemen Khusus
DFAT	: <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
DIO	: <i>Defence Intelligence Organization</i>
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
IOM	: <i>International Organization for Migration</i>
ISIL	: <i>Islamic State of Iraq and the Levant</i>
JCLEC	: <i>Jakarta Law Center for Law Enforcement</i>
JI	: Jemaah Islamiyah
KTN	: Komisi Tiga Negara
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organisation</i>
ONA	: <i>Office of National Assesment</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa

Polri	: Polisi Republik Indonesia
TNCC	: <i>Transnational Crime Center</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNODC	: <i>United Nations Office for Drugs and Crime</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.4	: Operasionalisasi Kerangka Pemikiran.....	20
-----------	--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya globalisasi yang mempermudah adanya keterhubungan antar individu, meningkatkan risiko dalam sistem internasional, terutama dampak dari aktor-aktor non-negara. Peristiwa 9/11 dan Bom Bali I menjadi kasus yang meningkatkan kembali kerja sama keamanan bilateral antara Australia dan Indonesia. Tidak hanya itu, terorisme juga menjadi salah satu isu prioritas dalam kebijakan keamanan dan pertahanan Australia. Aksi terorisme 11 September 2001 atau yang biasa dikenal sebagai peristiwa 9/11 di Amerika Serikat menjadikan kajian terorisme semakin menguat di dunia global. Terorisme menjadi permasalahan yang tidak dapat lagi di abaikan bagi banyak negara-negara di dunia, tak terkecuali Australia.

Upaya pemerintah untuk melawan terorisme juga meningkat setelah peristiwa 9/11 ini. Beberapa serangan teroris, khususnya kelompok teroris atau ekstremis Islam, yang terjadi di Australia menimbulkan ancaman bagi keamanan domestik Australia karena seringkali kelompok-kelompok ini menggunakan alat *cyber* yang canggih. Tidak hanya itu, banyak warga Australia yang termotivasi

oleh propaganda kelompok teroris ini, dimana lebih dari 200 warga Australia telah melakukan perjalanan ke zona konflik di Irak dan Suriah.<sup>1</sup>

Beberapa peristiwa pengeboman yang seringkali terjadi di negara tetangganya, Indonesia, memunculkan urgensi bagi Australia untuk memfokuskan isu terorisme sebagai bagian dari kebijakan keamanan dan pertahanannya. Hal ini memotivasi Pemerintah Australia untuk melakukan kerja sama kontra-terorisme dengan Pemerintah Indonesia. Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia dapat dikatakan cukup unik, karena kedua negara sering bekerja sama dalam berbagai bidang, namun juga sering mengalami tantangan dalam hubungan kerja sama itu sendiri. Australia dan Indonesia telah menjalin kerja sama sejak peristiwa menuju kemerdekaan Indonesia, terutama ketika Australia memberikan dukungan terhadap pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN). Namun, hubungan kedua negara juga seringkali dihadapi pada permasalahan-permasalahan yang membuat hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia mengalami penurunan.<sup>2</sup>

Salah satu peristiwa tersebut antara lain, pada tahun 1970-an, ketika Indonesia menghadapi masalah terkait Timor Timur, Australia menunjukkan reaksi keberatan atas beberapa kekerasan yang terjadi dalam pengambil alihan Timor Timur, meskipun pada akhirnya Australia menerima Timor Timur sebagai bagian dari negara Indonesia. Setelah kejadian tersebut, masalah Timor Timur

---

<sup>1</sup> Australian Government, "Countering Terrorism and Violent Extremism," <https://www.fpwhitepaper.gov.au/foreign-policy-white-paper/chapter-five-keeping-australia-and-australians-safe-secure-and-free-4>, diakses pada 1 Oktober 2018.

<sup>2</sup> Silvia Haryani, "The Indonesia and Australia Counter-Terrorism Cooperation: Comparison between Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono Government," *IJSS* Vol. 21 (41), hal 1-2.

selalu menjadi beban bagi Australia dan Indonesia untuk kembali membangun hubungan bilateralnya. Peristiwa Timor Timur menjadi salah satu peristiwa yang menyebabkan hubungan tidak harmonis antar kedua negara. Kerja sama pertahanan Australia dan Indonesia bahkan sempat berhenti selama konflik itu terjadi. Kondisi ini semakin dipersulit ketika referendum di Timor Timur pada tahun 1999 terjadi. Pada saat itu, Australia mendukung Indonesia untuk mengakui Timor Timur sebagai bagian integral dari Indonesia, namun kenyataannya Australia dengan jelas memfasilitasi Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia.<sup>3</sup>

Sejak peristiwa kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999, hubungan antara Australia dan Indonesia telah berangsur-angsur membaik.<sup>4</sup> Hubungan kemitraan strategis pertahanan kedua negara seringkali mengalami fluktuasi, terutama pada instansi-instansi militer kedua negara yaitu antara *Australian Defence Force* (ADF) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kerja sama pertahanan kedua negara sempat mengalami peningkatan setelah ditandatanganinya Perjanjian Lombok pada tahun 2006 yang juga menjadi dasar hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.

Namun, beberapa tahun kemudian muncul hubungan yang tidak harmonis antara Australia dan Indonesia, dimulai dengan adanya laporan dari dokumen rahasia *whistleblower*, November 2009, yang diungkapkan oleh Edward Snowden, dimana nama Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> "Australia and Indonesia: A tense but pragmatic relationship," *BBC News*, <https://www.bbc.com/news/world-australia-33144739>, diakses pada 1 Oktober 2018.

Mantan Wakil Presiden Boediono, beserta beberapa pejabat senior lainnya, termasuk istri Mantan Presiden, Ani Yudhoyono, masuk kedalam target pengawasan Pemerintah Australia. Menanggapi hal ini pemerintah Indonesia menanggukkan kerja sama militer dan patroli laut bersama Australia, termasuk operasi melawan penyelundupan manusia dan pembatasan jumlah kapal ilegal di pantai Australia. Penanggukan ini dilakukan setelah meluasnya laporan bahwa Australia berusaha melakukan penyadapan terhadap telepon Mantan Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta istri dan beberapa pejabat senior lainnya.<sup>5</sup>

Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia akan meminta perukaran informasi antara dua negara tersebut dihentikan sementara mengingat adanya laporan terhadap kasus ini. Menanggapi tuduhan tersebut, Pemerintah Australia mengambil langkah tidak berkomentar apapun terutama karena hal ini berkaitan dengan tradisi dalam intelijen Australia sendiri. Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat karena Pemerintah Australia menolak tuntutan Indonesia untuk mengklarifikasi laporan bahwa badan intelijen *Australian Signals Directorate* telah meretas telepon pribadi Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 silam. Ketidakstabilan

---

<sup>5</sup> Ewen MacAskill dan Lenore Taylor, "Australia's Spy Agencies Targeted Indonesian President's Mobile Phone," *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/world/2013/nov/18/australia-tried-to-monitor-indonesian-presidents-phone>, diakses pada 23 Oktober 2018.

hubungan kedua negara semakin diperburuk dengan pernyataan pemerintah Indonesia yang menarik kembali duta besarnya di Canberra.<sup>6</sup>

Hubungan kedua negara yang sempat merenggang akibat adanya dugaan penyadapan oleh intelijen Australia kembali membaik dengan adanya penandatanganan dokumen *Joint Understanding on a Code of Conduct* pada Agustus 2014. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa di Bali dan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perjanjian ini membahas mengenai kesepakatan kedua negara terkait operasi intelijen yang tidak akan mencampuri urusan domestik pihak lain dan pemulihan semua kerja sama militer antara kedua negara.

Kedua negara sepakat untuk tidak menggunakan kapasitas intelijen termasuk kapasitas dalam melakukan penyadapan atau cara-cara lainnya yang dapat merugikan kepentingan para pihak. Selain itu, perjanjian ini juga memuat adanya kesepakatan untuk kerja sama antar intelijen termasuk badan-badan yang relevan dan sesuai dengan hukum dan peraturan internasional masing-masing negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andreas Ismar, "Indonesia to Halt Military Cooperation with Australia Over Spy Row," *The Wall Street Journal*, <https://www.wsj.com/articles/indonesia-to-halt-military-cooperation-with-australia-over-spy-row-1384960963>, diakses pada 23 Oktober 2018.

<sup>7</sup> "Indonesia, Australia Tandatangani Perjanjian Keamanan," *BBC News*, [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/08/140828\\_ri\\_aus\\_sadap\\_mou](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140828_ri_aus_sadap_mou), diakses pada 29 Oktober 2018.

## 1.2 Identifikasi Masalah

### 1.2.1 Deskripsi Masalah

Salah satu aksi pengeboman terbesar pertama di Indonesia yang paling menyita perhatian masyarakat global, terjadi pada 12 Oktober 2002 di Bali dan peristiwa ini biasanya disebut sebagai Bom Bali I. Pada peristiwa ini, sebanyak 202 orang menjadi korban, dimana 88 diantaranya merupakan warga negara Australia. Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu fokus Australia dalam kebijakan keamanan dan pertahanannya. Pemerintah Australia meyakini bahwa Amrozi cs merupakan pelaku dari aksi terorisme Bom Bali dan juga dianggap sebagai bagian dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI), di bawah jaringan kelompok teroris internasional Al-Qaeda di Asia Tenggara. Mr. Downer dalam *Joint Media Release* yang diterbitkan oleh Pemerintah Australia menyatakan bahwa:

*“Both governments strongly condemned the bombing as a cowardly act of terrorism and agreed to pursue those responsible with relentless resolve to ensure that they are brought to justice”.*<sup>8</sup>

Pemerintah Australia juga menyatakan terjadinya peristiwa pengeboman di Bali merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab, dan kedua negara sepakat untuk menghadapi ancaman bersama dari kelompok terorisme ini bersama-sama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Minister for Foreign Affairs, “Joint Media Release; Joint Investigation and Intelligence Team to Investigate Bali Bombing,” *Australian Government*, [https://foreignminister.gov.au/releases/2002/fa148a\\_02.html](https://foreignminister.gov.au/releases/2002/fa148a_02.html), diakses pada 15 November 2018.

<sup>9</sup> Ibid.

Aksi terorisme di Bali menimbulkan banyak korban jiwa serta menciptakan teror traumatik bagi kebanyakan orang. Tidak hanya itu, terorisme juga semakin menyebar luas di berbagai belahan dunia. Peristiwa Bom Bali I memunculkan ancaman dan juga rasa tidak aman (*insecure*) bagi negara-negara tetangga Indonesia, salah satunya Australia. Ancaman yang ditimbulkan akibat aksi pengeboman tersebut juga dapat berjangka panjang, karena teror tersebut membuat banyak masyarakat merasa tidak aman dan takut akan kemungkinan terjadinya peristiwa serupa.

Setelah peristiwa Bom Bali I, terjadi pengeboman kembali pada Agustus 2003 di hotel J.W Mariot, Jakarta dan pengeboman kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tahun 2004. Berbagai peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia menuntut pemerintah kedua negara untuk selalu waspada akan adanya gerakan terorisme yang mengancam keamanan domestik Indonesia khususnya, dan juga negara-negara tetangganya seperti Australia. Penggunaan bom sebagai salah satu upaya teror, serta upaya pelaku yang cenderung memilih lokasi yang menjadi simbol atau pusat keramaian, bahkan di tempat-tempat yang tidak terduga di Indonesia, menunjukkan bahwa para teroris mencoba memperlihatkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang lebih besar dari apa yang diduga.<sup>10</sup>

Peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris Bom Bali, menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1438,

---

<sup>10</sup> Arif Wachjunadi, *Misi Walet Hitam*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017). Hal. 1-2

tanggal 15 Oktober 2002.<sup>11</sup> Pemerintah Australia juga memandang bahwa peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dapat mengancam keamanan domestik negaranya. Tidak hanya itu, stabilitas keamanan di Indonesia tentu juga dapat mengganggu stabilitas domestik di Australia, karena secara geografis kedua negara berada dalam wilayah yang berdekatan. Keadaan ini menuntut Pemerintah Australia untuk dapat mengambil peran dalam tindakan terkait kontra-terorisme bersama Indonesia.

Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa pemilihan target pengeboman, khususnya Bom Bali I di Indonesia, dilakukan karena para pelaku mencoba untuk menyampaikan pesan, khususnya setelah peristiwa 9/11. Mereka mencoba membangun teror bahwa segala sarana dan prasarana yang berhubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya akan selalu berada di bawah ancaman. Dalam hal ini, tentu ada motif yang dibawa oleh para pelaku teror dalam melaksanakan aksinya. Bom Bali I merupakan tiga rangkaian peristiwa pengeboman, dimana dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Kemudian, ledakan selanjutnya terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat, Jalan Hayam Wuruk 188, Denpasar.

Menanggapi peristiwa tersebut, Pemerintah Australia memperkuat kerja sama bilateral kontra-terorismenya bersama Indonesia, yang hingga saat ini masih terus berjalan. Tidak hanya itu, Pemerintah Australia juga mengeluarkan berbagai kebijakan terkait terorisme, dan walaupun memiliki hubungan yang seringkali

---

<sup>11</sup> Aulia Rosa Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional," *Deliberatif* Vol. 1, No.1 (Juni 2017): 12-13.

tidak harmonis, Pemerintah Australia turut memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya kontra-terorisme. Salah satu upaya kerja sama yang dilakukan Australia dan Indonesia tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism*. MoU ini juga memuat beberapa bantuan atau implementasi kerja sama antara kedua negara, antara lain melalui pembentukan *Jakarta Center for Law Enforcement (JCLEC)*, kerja sama di bidang intelijen, pengadaan *Operation Bali Assist*, dan beberapa bantuan teknis lainnya seperti pembentukan *Transnational Crime Center (TNCC)*.

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada faktor utama yang membuat Australia melakukan kerja sama dan memberikan bantuan kepada Indonesia dalam bidang kontra-terorisme (2002-2017). Isu terorisme yang dibahas dalam penelitian ini penulis batasi pada kasus Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Selain itu, penulis hanya berfokus pada Australia sebagai aktor utama dalam penelitian ini.

### 1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Mengapa Australia memberikan bantuan terhadap Indonesia dalam upaya kontra-terorisme pasca Bom Bali I?”**.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan alasan yang mempengaruhi Australia memberikan bantuan dalam upaya kontra-terorisme bersama Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperjelas pemahaman pembaca untuk mengerti alasan Australia memberikan bantuan terhadap Indonesia walaupun hubungan bilateral kedua negara sering mengalami fluktuasi.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

- a. penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, pengalaman, serta wawasan bagi pembaca dan juga dapat menjadi bahan, referensi ataupun masukan bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait kerja sama kontra-terorisme Australia dan Indonesia;
- b. diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi mengenai alasan Australia memberikan bantuan terhadap upaya kontra-terorisme Indonesia;
- c. penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dokumen akademis yang berguna serta dapat digunakan sewaktu-waktu untuk dijadikan acuan bagi aktivitas akademik.

#### **1.4 Kajian Literatur**

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis melakukan kajian literatur terhadap beberapa jurnal akademik yang telah mengkaji mengenai topik ini sebelumnya. Pada kajian literatur ini, terdapat perbedaan pandangan dari beberapa penulis terkait kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam bidang keamanan, khususnya pemberantasan terorisme. Perbedaan tersebut mengenai pendapat penulis yang menyatakan sikap mendukung kerja sama antara Australia dan Indonesia, dan kelompok yang kurang setuju akan adanya kerja sama tersebut. Penulis mencoba membaginya ke dalam dua kelompok; pro dan kontra.

Pada kelompok pertama, Silvia Haryani, dalam tulisannya berpendapat bahwa serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia membuat Pemerintah Australia menjadikan isu terorisme global sebagai prioritas utama dalam kebijakan pertahanan dan keamanannya di masa yang mendatang. Menurutnya, rangkaian insiden terorisme yang terjadi di Indonesia diarahkan kepada Pemerintah Australia sebagai mitra dari Amerika Serikat. Atas alasan tersebut, Indonesia bekerja sama dengan Australia secara bilateral, regional, ataupun multilateral, untuk mengungkap fakta-fakta dari kasus pengeboman yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, menurut Haryani, untuk mengatasi masalah terorisme, suatu negara akan membentuk koalisi melalui kerja sama antar badan intelijen untuk mengungkap pelaku teror. Banyaknya insiden terorisme yang terjadi di Indonesia berpengaruh terhadap hubungan kedua

negara, dimana kondisi tersebut memotivasi Australia dan Indonesia untuk melakukan kerja sama dalam melawan terorisme regional ataupun internasional.<sup>12</sup>

Selaras dengan pendapat penulis sebelumnya, Seniwati menyatakan bahwa banyaknya insiden terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki pengaruh yang serius pada hubungan antara kedua negara. Hal ini juga mendorong kedua negara untuk bekerja sama dalam melawan ancaman terorisme. Menurutnya, Pemerintah Australia menganggap bahwa ada kemungkinan bahwa kelompok teroris tersebut tetap ada dan akan terus melakukan penyerangan sampai tujuan mereka tercapai. Situasi ini memunculkan tantangan besar dari terorisme bagi kedua negara, dan juga mendorong kedua negara untuk mempertahankan keamanan mereka dalam melawan terorisme.<sup>13</sup>

Sedangkan, beberapa penulis ini memiliki pandangan yang berbeda dari penulis sebelumnya. Dalam tulisannya, Guy Wilson memiliki pendapat yang sedikit berbeda dari penulis sebelumnya. Ia menyatakan bahwa ekstremis Islam di Indonesia tidak akan secara signifikan mempengaruhi keamanan Australia dalam sepuluh tahun mendatang, walaupun telah terjadi peristiwa Bom Bali I yang membuat 88 warga Australia menjadi korban. Menurutnya, ancaman terhadap Australia dari kelompok ekstremisme Islam di Indonesia dinilai rendah dan semakin dapat diantisipasi. Pemerintah Australia dan Indonesia sama-sama tidak menganggap bahwa kekuatan dari kelompok itu merupakan kekuatan yang *spent*

---

<sup>12</sup> Silvia Haryani, "The Indonesia and Australia Counter-Terrorism Cooperation: Comparison between Megawati Soekarnoputri and Susilo Bambang Yudhoyono Government," *IJSS* Vol. 21 (41), hal 1-9.

<sup>13</sup> Seniwati, "The Role of Australia in Countering Terrorism in Indonesia," *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 8(5), hal 558-563.

*force*. Tidak hanya itu, terlepas dari motivasi anti-Barat dari kelompok-kelompok ekstremis, hanya ada sedikit bukti tentang niat atau tujuan kelompok tersebut dalam menargetkan aset atau warga Australia, meskipun ada kemungkinannya.<sup>14</sup>

Mendukung pendapat sebelumnya, Chow juga berpendapat bahwa ada masalah dengan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekutunya, Australia. Ia berpendapat bahwa ada motif lain dibalik kerja sama ini. Sebagai contoh, Chow menyebutkan bahwa Australia yang kehilangan 88 warga negaranya dalam pemboman itu, mencoba mempengaruhi *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) untuk mendapatkan tempat di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tahunan ASEAN sebagai “mitra dialog” permanen, bersama dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Pada KTT ASEAN ke-8, Mahathir membatalkan proposal pengajuan tersebut dan mengatakan bahwa masih terlalu cepat untuk membahas perluasan proses KTT dan memperluas keanggotaan ke negara-negara non-Asia.<sup>15</sup>

Tidak hanya itu, dalam tulisannya Chow juga menjabarkan kritikan Mahathir di akhir KTT yang menyatakan bahwa Australia ‘sangat tidak aman bagi umat Islam, karena akan ada kemungkinan pasukan keamanan Australia menggrebek rumah penduduk muslim di wilayah tersebut’. Mahathir juga mengemukakan kecurigaannya terhadap Australia, mengingat negara tersebut merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, bahwa Australia memanfaatkan

---

<sup>14</sup> Group Captain Guy Wilson, “Will Islamic Extremism in Indonesia affect Australia’s Security in the Next Ten Years?,” *Centre for Defence and Strategic Studies* (Mei 2016), hal 1-4.

<sup>15</sup> Jonathan T. Chow, “ASEAN Counterterrorism Cooperation Since 9/11,” *ASIAN SURVEY* Vol.XLV, No.2, Maret/April 2005, hal 302-321.

keterlibatannya dalam kebijakan keamanan regional untuk dapat memberikan pengaruh bagi Amerika Serikat dalam melakukan kontrol lebih. Dalam wawancara dengan *the Weekend Australian*, Mahathir mengatakan bahwa Australia harus menentukan dengan tepat keberpihakannya, di negara Asia atau negara Barat, dan jika Australia memosisikan sebagai kubu Barat, maka keterlibatannya tidak akan diterima baik oleh negara-negara di kawasan ASEAN.<sup>16</sup>

Jurnal-jurnal yang telah dipaparkan di atas berkontribusi terhadap penelitian penulis terkait sikap Australia dalam memberikan bantuan kontra-terorisme pasca Bom Bali I kepada Indonesia. Berdasarkan perdebatan di atas, penulis dalam skripsi ini membahas mengenai alasan yang membuat Australia memberikan bantuan kontra-terorisme kepada Indonesia walaupun kedua negara seringkali mengalami hubungan yang tidak harmonis. Penulis juga akan mengembangkan argumen bahwa bantuan kontra-terorisme yang diberikan Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh adanya kepentingan nasional dan ancaman dari musuh bersama.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang nantinya dijadikan alat dalam kerangka berpikir untuk menganalisis perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Pola interaksi dalam hubungan bilateral dapat diidentifikasi dengan adanya bentuk kerja sama antara dua negara.

---

<sup>16</sup> Ibid.

Kerja sama bilateral sendiri dapat diartikan sebagai adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk saling berinteraksi dalam bidang tertentu melalui cara dan tujuan yang telah disepakati bersama.<sup>17</sup> Kerja sama bilateral ini dilakukan untuk memperkuat hubungan kedua negara di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan nasional negara masing-masing.

Menurut Holsti, kerja sama merupakan keadaan dimana pemerintah kedua negara saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas serta merundingkan masalah, mengemukakan bukti untuk menyetujui suatu penyelesaian, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>18</sup> Holsti juga menjabarkan bahwa ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lainnya, salah satunya karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.<sup>19</sup>

Dalam perkembangannya, terorisme telah menjadi isu yang menjadi perhatian banyak negara di dunia, dan oleh karenanya, salah satu upaya melawan terorisme dapat dilakukan melalui adanya kerja sama internasional. Menurut Etel Solingen, kerja sama internasional dilakukan karena adanya kepentingan bersama dari para aktor yang terlibat untuk merespons serta mengatasi isu-isu tertentu yang menjadi fokus bersama. Pada umumnya, kerja sama ini dilakukan oleh negara-

---

<sup>17</sup> Poltak Partogi Nainggolan, dkk., *Indonesia dan Kemitraan Strategis Dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013), hal. 70

<sup>18</sup> K. J. Holsti, Terj. M. Tahir Azhary, *Politik Internasional; Kerangka untuk Analisis*, (Jakarta: Erlangga, 1988): 209.

<sup>19</sup> Poltak Partogi Nainggolan, dkk., *Indonesia dan Kemitraan Strategis Dalam Hubungan Internasional* (Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2013), hal. 71-72.

negara yang berada dalam suatu kawasan yang sama, terutama apabila ditemukan adanya potensi ancaman bersama terhadap kawasan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan masing-masing, sehingga mereka merasa perlu bersinergi satu sama lain dalam menghadapi potensi ancaman tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Paul Seabury, dalam menjalankan segala aspek kegiatan, negara tentu saja dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya sendiri, dan seringkali hal ini digunakan untuk menganalisa arah kebijakan luar negeri suatu negara. Seabury mendefinisikan kepentingan nasional sebagai beberapa ide atau tujuan yang berusaha dicapai oleh suatu negara melalui hubungannya dengan negara lain.<sup>21</sup> Tidak hanya itu, Robert J. Art, membagi intensitas kepentingan nasional kedalam tiga tingkatan yakni *vital interest*, *highly important interest*, dan *important interest*. Pertama, *vital interest*, merupakan salah satu hal penting atau esensial yang jika tidak dicapai oleh negara maka akan memberikan biaya (*costs*) yang sangat besar bagi negara, atau dengan kata lain negara tidak akan bisa *survive*.

Kedua, *highly important*, dimana kepentingan ini berkaitan dengan hal-hal yang jika dicapai oleh negara akan memberikan manfaat yang sangat besar, tetapi jika tidak tercapai maka tidak menimbulkan dampak yang besar. Ketiga, *important interest*, berkaitan dengan kepentingan yang dapat membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negaranya, dan juga memberikan kontribusi lebih umum terhadap lingkungan internasional, serta apabila

---

<sup>20</sup> Poltak Partogi Nainggolan, dkk., *Indonesia dan Kemitraan Strategis Dalam Hubungan Internasional*, hal. 112.

<sup>21</sup> K. J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis, 3rd Ed.*, (Prentice Hall International, Inc: Engelwood Cliffs, New Jersey, 1977), hal. 138-140.

kepentingan ini tidak tercapai maka negara tidak terlalu mengalami kerugian. *Important interest* lebih berkaitan dengan kepentingan terkait nilai-nilai seperti nilai Hak Asasi Manusia ataupun perubahan lingkungan.<sup>22</sup>

Hubungan bilateral yang dilakukan oleh dua negara tentu memiliki tujuannya masing-masing, dimana tujuan ini yang kemudian dirumuskan melalui sebuah kebijakan terkait dengan kepentingan nasional negara tersebut. James N. Rosenau mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai upaya suatu negara untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya serta untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>23</sup> Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan dalam suatu negara untuk menghadapi negara atau unit politik internasional lainnya. Kebijakan luar negeri diambil untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam kepentingan nasionalnya.<sup>24</sup>

Tidak hanya itu, menurut Harald Muller dijelaskan bahwa ada kecenderungan negara melakukan kerja sama dalam bidang keamanan karena adanya musuh bersama yang dihadapi dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai negara-negara yang terlibat. Muller juga menyatakan bahwa kerja sama keamanan dilakukan negara dengan negara lainnya untuk memenuhi

---

<sup>22</sup> Robert J. Art, *A Grand Strategy for America*, (Ithaca, United States: Cornell University Press, 2003), hal. 45-47.

<sup>23</sup> A. A. Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 49.

<sup>24</sup> Teuku May Rudy, *Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* (Bandung: Refika Aditama, 2002): 27-28.

kelangsungan hidup dan kepentingan nasional negaranya.<sup>25</sup> Dalam buku Robert Jervis yang berjudul *Perception and Misperception in International Politics* dijelaskan bahwa konsep persepsi sangat berkaitan dengan setiap pembuatan keputusan yang akan diambil oleh negara. Persepsi bersifat sangat subjektif, dimana hal ini sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing orang atau kelompok yang mengamati.<sup>26</sup> Persepsi juga berkaitan dengan usaha untuk menyimpulkan interaksi aktor lainnya berdasarkan sudut pandang masing-masing negara, terkait keadaan negara lainnya. Tidak hanya itu, Jervis juga menyatakan bahwa persepsi biasanya dipengaruhi oleh pandangan (*images*), kepercayaan atau keyakinan (*belief*), maupun intensi (*intention*) suatu negara dalam hubungan internasional. Lebih lanjut, Jervis mengatakan bahwa istilah “*intentions*” berkaitan dengan pengertian “...*the collection of actions the state will or would take because that is what others are trying to predict*”.<sup>27</sup>

David Dewitt dalam tulisannya juga mengatakan sesuai dengan laporan yang dibuat oleh *the Palm Commission*, dinyatakan bahwa adanya *common security* merupakan upaya untuk menghindari perang, terutama nuklir, dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua bangsa karena semua negara di dunia akan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai keamanan masing-masing. Cara efektif yang dapat digunakan untuk menciptakan keamanan adalah memunculkan proses positif yang dapat mengarah pada perdamaian dan

---

<sup>25</sup> Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A. Simmons, *Handbook of International Relations; Second Edition* (Los Angeles: SAGE Publications, 2013): 607-609.

<sup>26</sup> Robert Jervis, *Perception and Misperception in International Politics*, (United Kingdom: Princeton University Press, 2017), hal. 3-10.

<sup>27</sup> *Ibid.* 48.

perlucutan senjata. Lebih lanjut, dinyatakan pula bahwa adanya persamaan pandangan akan suatu ancaman akan membuat negara-negara berupaya untuk mengurangi resiko perang melalui prinsip kerja sama.<sup>28</sup>

Dalam laporan tersebut, *the Palm Commission* menetapkan enam prinsip dalam keamanan bersama yaitu, (1) semua negara memiliki hak yang sah atas keamanan; (2) kekuatan militer bukan instrumen yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan antar negara; (3) sikap menahan diri (*restraint*) diperlukan dalam mewujudkan kebijakan nasional; (4) keamanan tidak dapat dicapai melalui keunggulan militer; (5) pengurangan dan pembatasan kualitatif persenjataan diperlukan untuk mewujudkan keamanan bersama; dan (6) 'keterkaitan' antara negosiasi senjata dan peristiwa politik harus dihindari. Konsep *common security* juga menempatkan fokus terhadap ancaman militer dan non-militer, walaupun dalam konteks Eropa fokus keamanan ditujukan pada pengelolaan persaingan nuklir di Timur-Barat. Dengan demikian, inti dari *common security* sesuai dengan laporan *the Palm Commission* adalah mewujudkan keamanan melalui gagasan '*security with*' bukan lagi melalui '*security against*'.<sup>29</sup>

Konsep-konsep yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat dalam bagan di bawah, dan hal ini dilakukan guna memperjelas fungsi kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis. (lihat bagan 1.4)

---

<sup>28</sup> David Dewitt, "Common, Comprehensive, and Cooperative Security," *The Pacific Review* Vol.7 No.1 (1994): 4-7

<sup>29</sup> Ibid.

### Bagan 1.4 Operasionalisasi Kerangka Pemikiran



Dari pendekatan diatas, penulis mencoba melihat korelasi perspektif tersebut apabila dikaitkan dengan alasan Australia memberikan bantuan terhadap upaya kontra-terorisme bersama Indonesia.

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metode Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, metode atau pendekatan untuk mengeksplorasi serta memahami makna terkait masalah sosial atau kemanusiaan yang berada di lingkungan sekitar individu atau sekelompok orang.<sup>30</sup> Proses penelitian kualitatif meliputi beberapa upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur yang muncul, melakukan pengumpulan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari topik yang spesifik sampai ke tema yang umum, dan kemudian penulis

---

<sup>30</sup> John W. Creswell, *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition, (United States of America: Sage Publication, 2014), 4.

membuat interpretasi atau menafsirkan makna dari data yang telah di analisis.<sup>31</sup> Metode kualitatif menggunakan observasi, dokumen, data audiovisual, menganalisa teks dan gambar, serta membuat interpretasi dari tema dan pola yang ditemukan.<sup>32</sup> Penelitian kualitatif akan menghasilkan data non-numerik yang sifatnya verbal.

Menurut Creswell, dalam metode penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan untuk melakukan penelitian antara lain, penelitian naratif, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.<sup>33</sup> Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari metode penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan suatu penelitian dimana peneliti akan melakukan pengembangan analisis mendalam terhadap sebuah kasus, yang biasanya merupakan sebuah program, peristiwa, aktivitas, ataupun proses dari individu maupun sekelompok orang, dan kasus ini dibatasi oleh waktu serta aktivitas sehingga peneliti mengumpulkan beberapa informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu.<sup>34</sup>

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi media, baik melalui data primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid. 17.

<sup>33</sup> Ibid. 12.

<sup>34</sup> Ibid. 14.

langsung diperoleh dari sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.<sup>35</sup> Dalam hal ini data primer, penulis dapatkan dari data atau laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun organisasi internasional melalui situs resminya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu media, seperti buku, laporan, jurnal, maupun catatan yang dipublikasikan ataupun tidak yang merupakan milik orang lain.<sup>36</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis bagi ke dalam lima bab dan di tiap bab memuat pembahasan-pembahasan yang lebih mendalam terkait topik penelitian. Penjelasan mengenai bab yang di bahas dalam penelitian ini:

**BAB I – Pendahuluan.** Di dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai pendahuluan sebagai awal dari skripsi ini. Bab I akan penulis bagi ke dalam tujuh sub-bab yaitu, latar belakang masalah; identifikasi masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; kajian literatur; kerangka pemikiran; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

**BAB II – Kebijakan Australia Terkait Kontra-Terrorisme dan Kerja Sama Kontra-Terrorisme bersama Indonesia.** Pada bab II dijelaskan mengenai kebijakan yang diambil oleh Australia terkait kontra-terorisme. Tidak hanya itu, dijelaskan pula bantuan-bantuan yang telah diberikan Australia kepada Indonesia dalam kontra-terorisme. Pembahasan dibagi ke dalam empat sub-bab antara lain,

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

<sup>36</sup> Ibid.

pandangan Australia terkait terorisme; kebijakan Australia terkait terorisme; kerja sama kontra-terorisme Australia-Indonesia; serta implementasi kerja sama kontra-terorisme Australia-Indonesia.

**BAB III – Analisa Kepentingan Australia dalam Upaya Kontra-Terrorisme bersama Indonesia.** Bab ini penulis fokuskan untuk menjelaskan serta menggambarkan kepentingan Australia dalam upaya kontra-terorisme bersama Indonesia. Pembahasan pada bab ini penulis bagi menjadi tiga sub-bab yaitu, Australia dan pandangannya terhadap Indonesia; kepentingan Australia dalam kerja sama kontra-terorisme bersama Indonesia; serta terorisme sebagai ancaman bersama bagi Australia dan Indonesia.

**BAB IV – Kesimpulan.** Menjadi bab terakhir dalam penelitian ini, dimana penulis memaparkan pembahasan mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini, beserta rekomendasi dan kekurangan atau kesulitan selama melakukan penelitian ini.